

BAB II

GAMBARAN UMUM

Pada gambaran umum ini akan diuraikan mengenai informasi-informasi umum yang berkaitan tentang obyek penelitian dengan topik Implementasi Kebijakan Pengawasan Dalam Izin Pengelolaan Air Tanah di Kota Semarang, yaitu kondisi Kota Semarang baik visi, misi, kondisi geografis dan kondisi demografis. Selanjutnya, terdapat gambaran umum mengenai instansi-instansi yang berisi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) beserta struktur organisasinya.

2.1 Kota Semarang

2.1.1 Visi dan Misi

Visi : “Terwujudnya Semarang sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang
Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera”

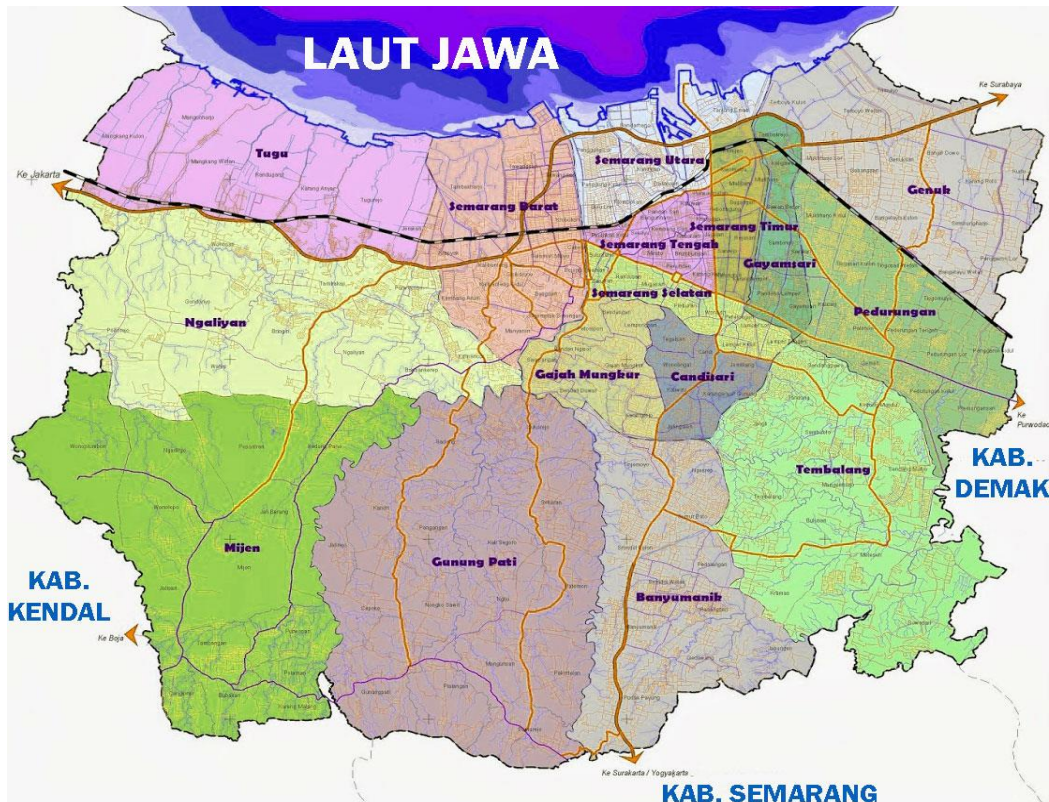
Misi :

1. Mewujudkan Sumberdaya Manusia dan Masyarakat Kota Semarang yang Berkualitas
2. Mewujudkan Pemerintahan Kota yang Efektif dan Efisien, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Serta Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum.
3. Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah.
4. Mewujudkan Tata Ruang Wilayah dan Infrastruktur yang Berkelanjutan.
5. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

2.1.2 Kondisi Geografis

2.1.2.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Gambar 2.1
Peta Kota Semarang



Kota Semarang merupakan ibu kota dan sekaligus sebagai Kota Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, mempunyai luas wilayah sebesar 373,70 km² dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Demak
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kendal

Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Wilayah kecamatan terdiri atas 2 kecamatan terluas dan terkecil, kecamatan dengan wilayah terluas tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan, yaitu Kecamatan Mijen dengan luas wilayah sebesar 57,55 km² dan Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah sebesar 54,11 km².

Sementara wilayah kecamatan dengan luas terkecil, yaitu Kecamatan Semarang Selatan yang mempunyai luas wilayah 5,93 km² dan Kecamatan Semarang Tengah yang mempunyai luas wilayah sebesar 6,14 km². Kecamatan terkecil ini merupakan daerah pusat kota yang sekaligus sebagai pusat perekonomian atau bisnis kota Semarang sehingga sebagian besar dari wilayahnya banyak terdapat bangunan bersejarah, seperti; Kawasan Simpang Lima, Kawasan Tugu Muda, Pasar Bulu, Pasar Peterongan, Pasar Johar dan sekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu luas wilayah dan luas masing-masing per-kecamatan yang ada di Kota Semarang:

Tabel 2.1

Luas Wilayah di Kota Semarang

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Presentase (%)
1.	Mijen	57,55	15,4
2.	Gunungpati	54,11	14,47
3.	Banyumanik	25,69	6,87
4.	Gajah Mungkur	9,07	2,42
5.	Semarang Selatan	5,93	1,58
6.	Candisari	6,54	1,75
7.	Tembalang	44,20	11,83
8.	Pedurungan	20,72	5,54
9.	Genuk	27,39	7,32
10.	Gayamsari	6,18	1,65
11.	Semarang Timur	7,70	2,06
12.	Semarang Utara	10,97	2,93
13.	Semarang Tengah	6,14	1,64
14.	Semarang Barat	21,74	5,81
15.	Tugu	31,78	8,5
16.	Ngaliyan	37,99	10,16
JUMLAH		373,7	100

Sumber: BPS Kota Semarang diolah, 2017

2.1.2.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kota Semarang merupakan kota dengan letak geografis yang strategis karena berada di jalur lalu lintas ekonomi di Pulau Jawa, terletak di antara 6°50'-7°10' LS dan 109°35'-110°50' BT dengan suhu udara berkisar antara 20-30° Celcius dan suhu rata-rata 27° Celcius. Didalam proses perkembangannya, kota Semarang sangat dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang membentuk suatu kota yang mempunyai ciri khas yaitu kota pegunungan dan kota pantai. Didaerah perbukitan

mempunyai ketinggian 90 – 359 meter dibawah permukaan laut, sedangkan di daerah dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 – 3,5 meter dibawah permukaan laut.

Dengan letak geografis yang strategis, Kota Semarang menjadi sebuah pondasi pembangunan di Jawa Tengah yang terdiri atas empat simpul pintu gerbang yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur, dan koridor barat. Kota ini sangat berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, terutama dengan adanya pelabuhan untuk jaringan jalur transportasi laut dan jaringan transportasi darat (jalur kereta api dan jalan raya) serta jaringan transportasi udara, yaitu bandar udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Jawa Tengah.

2.1.2.3 Topografi

Secara topografis Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai, dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan. Daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan 25% dan 37,78 % merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Kondisi lereng tanah Kota Semarang dibagi menjadi 4 jenis kelerengan yaitu lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara dan Tugu, serta sebagian wilayah Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen. Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan, lereng III (15-40%) meliputi wilayah di sekitar

Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah kecamatan Mijen (daerah Wonoplumbon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, serta Kecamatan Candisari. Sedangkan lereng IV (> 50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik (sebelah tenggara), dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati, terutama disekitar Kali Garang dan Kali Kripik. Kota Bawah yang sebagian besar tanahnya terdiri dari pasir dan lempung. Pemanfaatan lahan lebih banyak digunakan untuk jalan, permukiman atau perumahan, bangunan, halaman, kawasan industri, tambak, empang dan persawahan.

Kota Bawah sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pendidikan dan kebudayaan, angkutan atau transportasi dan perikanan. Berbeda dengan daerah perbukitan atau Kota Atas yang struktur geologinya sebagian besar terdiri dari batuan beku. Wilayah Kota Semarang berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan 348,00 meter dpl (di atas permukaan air laut). Secara topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan, sehingga memiliki wilayah yang disebut sebagai kota bawah dan kota atas. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90,56 - 348 mdpl yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati, dan di dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 mdpl. Kota bawah merupakan pantai dan dataran rendah yang memiliki kemiringan antara 0% sampai 5%, sedangkan dibagian Selatan merupakan daerah dataran tinggi dengan kemiringan bervariasi antara 5%-40%.

Kota Semarang sangat dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang membentuk suatu kota yang mempunyai ciri khas yaitu terdiri dari daerah perbukitan, dataran

rendah dan daerah pantai. Dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan tanah berkisar antara 0% sampai 40% (curam) dan ketinggian antara 0,75 – 348,00 mdpl. Selengkapnya ketinggian tempat di Kota Semarang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Ketinggian Tempat di Kota Semarang

No.	Bagian Wilayah	Ketinggian diatas permukaan air laut (mdpl)
1	Daerah Pantai	0.75
	<i>Coast</i>	
2	Pusat Keramaian Kota	2.45
	<i>Downtown</i>	
3	Simpang Lima	3.49
	<i>Simpang Lima</i>	
4	Candi Baru	90.56
	<i>Candi Baru</i>	
5	Jatingaleh	136.00
	<i>Jatingaleh</i>	
6	Gombel	270.00
	<i>Gombel</i>	
7	Gunungpati (Sebelah Barat)	259.00
	<i>Gunungpati (West Side)</i>	
9	Gunungpati (Sebelah Timur Laut)	348.00
	<i>Gunungpati (Northeast)</i>	
10	Mijen (Bagian Atas)	253.00
	<i>Mijen</i>	

Sumber: BPS Kota Semarang 2016

2.1.2.4 Geologi

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Magelang - Semarang (RE. Thaden, dkk; 1996) kondisi geologi Kota Semarang, susunan stratigrafinya adalah sebagai berikut: Aluvium (Qa), Batuan Gunungapi Gajahmungkur (Qhg), Batuan Gunungapi Kaligesik (Qpk), Formasi Jongkong (Qpj), Formasi Damar (QTd), Formasi Kaligetas (Qpkg), Formasi Kalibeng (Tmkl), Formasi Kerek (Tmk). Pada dataran rendah berupa endapan aluvial sungai, endapan fasies dataran delta dan endapan fasies pasang-surut. Endapan tersebut terdiri dari selang-seling antara lapisan pasir, pasir lanauan dan lempung lunak, dengan sisipan lensa-lensa kerikil dan pasir vulkanik. Sedangkan daerah perbukitan sebagian besar memiliki struktur geologi berupa batuan beku.

Struktur geologi yang cukup mencolok di wilayah Kota Semarang berupa kelurusan-kelurusan dan kontak batuan yang tegas yang merupakan pencerminan struktur sesar baik geser mendatar dan normal cukup berkembang di bagian tengah dan selatan kota. Jenis sesar yang ada secara umum terdiri dari sesar normal, sesar geser dan sesar naik. Sesar normal relatif ke arah barat - timur sebagian agak cembung ke arah utara, sesar geser berarah utara selatan hingga barat laut-tenggara, sedangkan sesar normal relatif berarah barat - timur. Sesar-sesar tersebut umumnya terjadi pada batuan Formasi Kerek, Formasi Kalibeng dan Formasi Damar yang berumur kuartar dan tersier.

Berdasarkan struktur geologi yang ada di Kota Semarang terdiri atas tiga bagian, yaitu struktur joint (kekar), patahan (fault), dan lipatan. Daerah patahan

tanah bersifat erosif dan mempunyai porositas tinggi, struktur lapisan batuan yang diskontinyu (tak teratur), heterogen, sehingga mudah bergerak atau longsor. Pada daerah sekitar aliran Kali Garang merupakan patahan Kali Garang, yang membujur arah utara sampai selatan, di sepanjang Kaligarang yang berbatasan dengan Bukit Gombel. Patahan ini bermula dari Ondorante, ke arah utara hingga Bendan Duwur.

Patahan ini merupakan patahan geser, yang memotong formasi Notopuro, ditandai adanya zona sesar, tebing terjal di Ondorante, dan pelurusan Kali Garang serta beberapa mata air di Bendan Duwur. Daerah patahan lainnya adalah Meteseh, Perumahan Bukit Kencana Jaya, dengan arah patahan melintas dari Utara ke Selatan.

Sedangkan wilayah Kota Semarang yang berupa dataran rendah memiliki jenis tanah berupa struktur pelapukan, endapan, dan lanau yang dalam. Jenis Tanah di Kota Semarang meliputi kelompok mediteran coklat tua, latosol coklat tua kemerahan, asosiasi alluvial kelabu, Alluvial Hidromorf, Grumosol Kelabu Tua, Latosol Coklat dan Komplek Regosol Kelabu Tua dan Grumosol Kelabu Tua. Kurang lebih sebesar 25% wilayah Kota Semarang memiliki jenis tanah mediteranian coklat tua. Sedangkan kurang lebih 30% lainnya memiliki jenis tanah latosol coklat tua. Jenis tanah lain yang ada di wilayah Kota Semarang memiliki geologi jenis tanah asosiasi kelabu dan aluvial coklat kelabu dengan luas keseluruhan kurang lebih 22% dari seluruh luas Kota Semarang. Sisanya alluvial hidromorf dan grumosol kelabu tua.

2.1.2.5 Hidrologi

Potensi air (hidrologi) di Kota Semarang bersumber pada sungai – sungai yang mengalir di Kota Semarang antara lain Kali Garang, Kali Pengkol, Kali Kreo, Kali Banjir Kanal Timur, Kali Babon, Kali Sringin, Kali Kripik, Kali Dungadem dan lain sebagainya. Kali Garang yan bermata air di gunung Ungaran, alur sungainya memanjang ke arah Utara hingga mencapai Pegandan tepatnya di Tugu Soeharto, bertemu dengan aliran Kali Kreo dan Kali Kripik. Kali Garang sebagai sungai utama pembentuk kota bawah yang mengalir membelah lembah-lembah Gunung Ungaran mengikuti alur yang berbelok-belok dengan aliran yang cukup deras. Setelah diadakan pengukuran debit Kali Garang mempunyai debit 53,0 % dari debit total dan kali Kreo 34,7 % selanjutnya Kali Kripik 12,3 %. Oleh karena Kali Garang memberikan airnya yang cukup dominan bagi Kota Semarang, maka langkah-langkah untuk menjaga kelestariannya juga terus dilakukan. Karena Kali Garang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air minum warga Kota Semarang.

Air Tanah Bebas ini merupakan air tanah yang terdapat pada lapisan pembawa air (aquifer) dan tidak tertutup oleh lapisan kedap air. Permukaan air tanah bebas ini sangat dipengaruhi oleh musim dan keadaan lingkungan sekitarnya. Penduduk Kota Semarang yang berada di dataran rendah, banyak memanfaatkan air tanah ini dengan membuat sumur-sumur gali (dangkal) dengan kedalaman rata-rata 3-18 m. Sedangkan untuk peduduk di dataran tinggi hanya dapat memanfaatkan sumur gali pada musim penghujan dengan kedalaman berkisar antara 20 - 40 m.

Air Tanah Tertekan adalah air yang terkandung di dalam suatu lapisan pembawa air yang berada diantara 2 lapisan batuan kedap air sehingga hampir tetap debitnya disamping kualitasnya juga memenuhi syarat sebagai air bersih. Debit air ini sedikit sekali dipengaruhi oleh musim dan keadaan di sekelilingnya. Untuk daerah Semarang bawah lapisan aquifer di dapat dari endapan alluvial dan delta sungai Garang. Kedalaman lapisan aquifer ini berkisar antara 50 - 90 meter, terletak di ujung Timur laut Kota dan pada mulut sungai Garang lama yang terletak di pertemuan antara lembah sungai Garang dengan dataran pantai. Kelompok aquifer delta Garang ini disebut pula kelompok aquifer utama karena merupakan sumber air tanah yang potensial dan bersifat tawar. Untuk daerah Semarang yang berbatasan dengan kaki perbukitan air tanah artois ini terletak pada endapan pasir dan konglomerat formasi damar yang mulai diketemukan pada kedalaman antara 50 – 90 m. Pada daerah perbukitan kondisi artois masih mungkin ditemukan. karena adanya formasi damar yang permeable dan sering mengandung sisipan-sisipan batuan lanau atau batu lempung.

2.1.2.6 Kondisi Demografis

Penduduk kota Semarang menurut data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang pada tahun 2016 adalah 1.602.717 jiwa. Dengan jumlah penduduk tersebut, Semarang menduduki peringkat ke-5 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Jawa Tengah. Perkembangan dan pertumbuhan penduduk Kota Semarang mengalami peningkatan, berikut data tentang peningkatan jumlah penduduk di Kota Semarang selama 4 tahun terakhir:

Tabel 2.3
Peningkatan Jumlah Penduduk Kota Semarang
Tahun 2013 - 2017

No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Presentase Peningkatan (%)
1.	2013	1.572.105	-
2.	2014	1.584.906	0,97
3.	2015	1.595.187	0,59
4.	2016	1.602.717	0,47
5.	2017	1.610.605	0,49

Sumber: BPS Kota Semarang, 2017

Pada tabel 2.3, dapat diketahui bahwa dalam kisaran waktu 5 tahun terakhir jumlah penduduk di Kota Semarang semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2013 ke tahun 2014 dengan presentase sebesar 0,97%. Pada tahun berikutnya, yaitu 2014 ke tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 0,59% diikuti dengan tahun berikutnya yaitu pada tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar 0,47% dan pada selang waktu tahun 2016 ke tahun 2017 hanya terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 0,49%.

2.2 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

Dengan diterbitkannya Perda Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Jawa Tengah, pembentukan dinas baru termasuk Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Tengah berganti menjadi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah yang kemudian diperkuat dengan adanya Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 74 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tupoksi dan Tata Kerja Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah

sendiri sebagai suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bidang energi dan sumber daya mineral di bawah pimpinan Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2.2.1 Visi dan Misi

Visi: “Menuju Masyarakat Sejahtera Melalui Penguatan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kemandirian Energi”

Masyarakat Sejahtera

Pembangunan yang dilaksanakan pada sektor ESDM diharapkan mampu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial. Sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan tercukupi kebutuhan energi maupun bahan baku lainnya, sehingga berdampak pada pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral

Paradigma baru pembangunan saat ini memberikan porsi seluas-luasnya kepada daerah dan masyarakat untuk mengelola kekayaan alamnya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berimbang. Kebijakan alokasi sumber daya mineral adalah langkah awal dari implementasi kewenangan pengelolaan sumber daya mineral. Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah total 32.584 km² atau sekitar 25,04% dari luas pulau Jawa, mempunyai potensi bahan galian tambang cukup beragam dan potensial untuk dikembangkan. Upaya pengelolaan

pertambangan di wilayah Provinsi Jawa Tengah akan menjadi sangat penting dan strategis kedudukannya untuk mendukung pembangunan ekonomi pertambangan maupun infrastruktur untuk Provinsi Jawa Tengah maupun pasokan bagi wilayah berkembang di sekitarnya.

Alokasi pengelolaan dan pengusahaan sumberdaya mineral tersebut mempunyai implikasi penting terhadap masyarakat maupun investasi pertambangan terutama dalam upaya mendukung kelestarian fungsi lingkungan, kelestarian sumber daya mineral, tataguna lahan, permasalahan sosial dan budaya. Kenyataan bahwa kegiatan pertambangan adalah kegiatan yang merubah bentang alam dengan berbagai kemungkinan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut.

Kemandirian Energi

Kemandirian Energi di Jawa Tengah diupayakan dengan mengoptimalkan potensi energi lokal setempat dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, mendorong pembangunan infrastruktur bidang energi. Potensi energi non fosil di Jawa Tengah sangatlah melimpah, seperti panas bumi, air, surya, biogas, biomassa, gas rawa untuk dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai pengganti bahan bakar yang berasal dari energi fosil. Provinsi Jawa Tengah bertekad untuk meningkatkan bauran energi menjadi 10,2% dari kondisi tahun 2012 sebesar 4,42%. Bauran energi di Jawa Tengah masih tergantung pada energi fosil, Terdapat beberapa faktor yang menentukan kemandirian energi. Salah satunya adalah kemampuan menjamin ketersediaan energi dengan harga terjangkau.

Beberapa rencana pembangunan perpipaan gas di Jawa Tengah juga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan energi bagi industri dan masyarakat. Kemandirian energi yang dituju harus dapat mengurangi atau menanggulangi masalah kemiskinan dimana sumber energi tersebut dibangun (Pro Poor). Selain itu juga harus dapat memberi peluang lapangan pekerjaan khususnya untuk masyarakat setempat (Pro Job) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Pro Growth) serta memperhatikan konservasi dan berkelanjutan lingkungan (Pro Environment).

Misi:

1. Meningkatkan Pengelolaan Pertambangan Dan Air Tanah Melalui Optimalisasi Pendayagunaan Dengan Mempertimbangkan Azas Konservasi;
2. Meningkatkan Pengelolaan Dan Pendayagunaan Ketenagalistrikan Dan Migas, Untuk Menjamin Ketersediaan Energi Melalui Peningkatan Infrastruktur Dan Diversifikasi Energi;
3. Mengembangkan Potensi Energi Baru Dan Terbarukan Melalui Optimalisasi Penerapan Teknologi Tepat Guna Secara Mandiri;
4. Meningkatkan Upaya Pencegahan Resiko Bencana Alam Geologi Menuju Masyarakat Sadar Resiko Bencana Geologi;
5. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Yang Profesional Di Bidang ESDM.

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan

tugas tersebut Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang energi dan sumber daya mineral lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Pelaksanaan tugas di bidang geologi, mineral dan batubara, air tanah dan panas bumi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang energi dan sumber daya mineral;
- f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan susunan organisasi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, rincian komposisi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

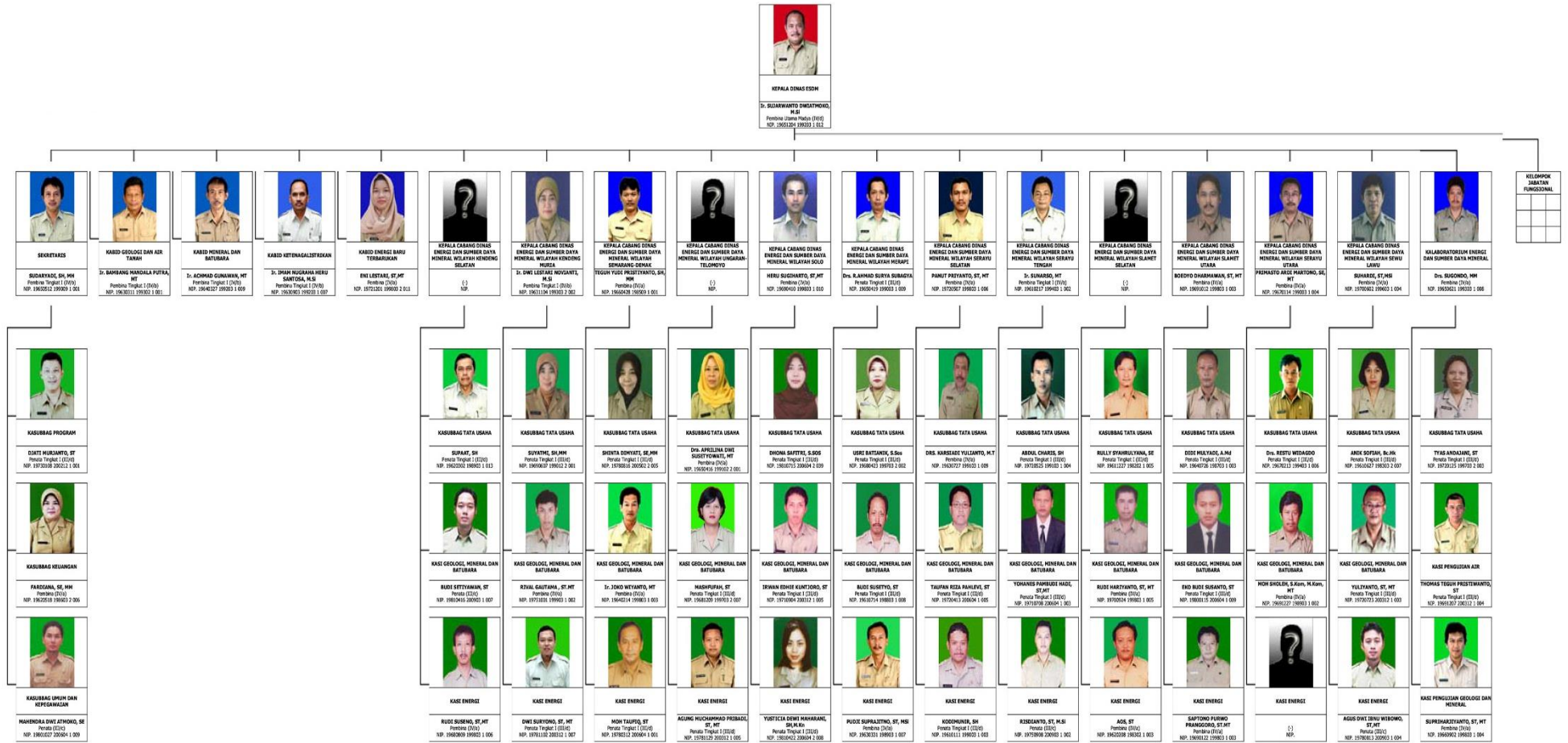
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Bidang Geologi, Mineral dan Batubara
4. Bidang Air Tanah dan Panas Bumi
5. Bidang Ketenagalistrikan

6. Bidang Minyak dan Gas Bumi

7. Cabang Dinas ESDM

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah



2.3 DPMPTSP Jawa Tengah

2.3.1 Visi dan Misi

Visi : “Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Profesional”

Misi :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki integritas dan provisional.
2. Memberikan keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum pada setiap proses dan produk perizinan.
3. Memberikan pelayanan secara terbuka dan akuntabel dalam proses perizinan.
4. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan fokus, peduli, dan penuh semangat.
5. Membangun sistem pelayanan perizinan terpadu yang berbasis kompetensi dan teknologi informasi.

2.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

DPMPTSP mempunyai tugas pokok yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian

- penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
- b. Pengoordinasian kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
 - c. Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
 - e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

2.3.3 Dasar Hukum

UPT PTSP BPMD (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah berdiri dengan dasar hukum:

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

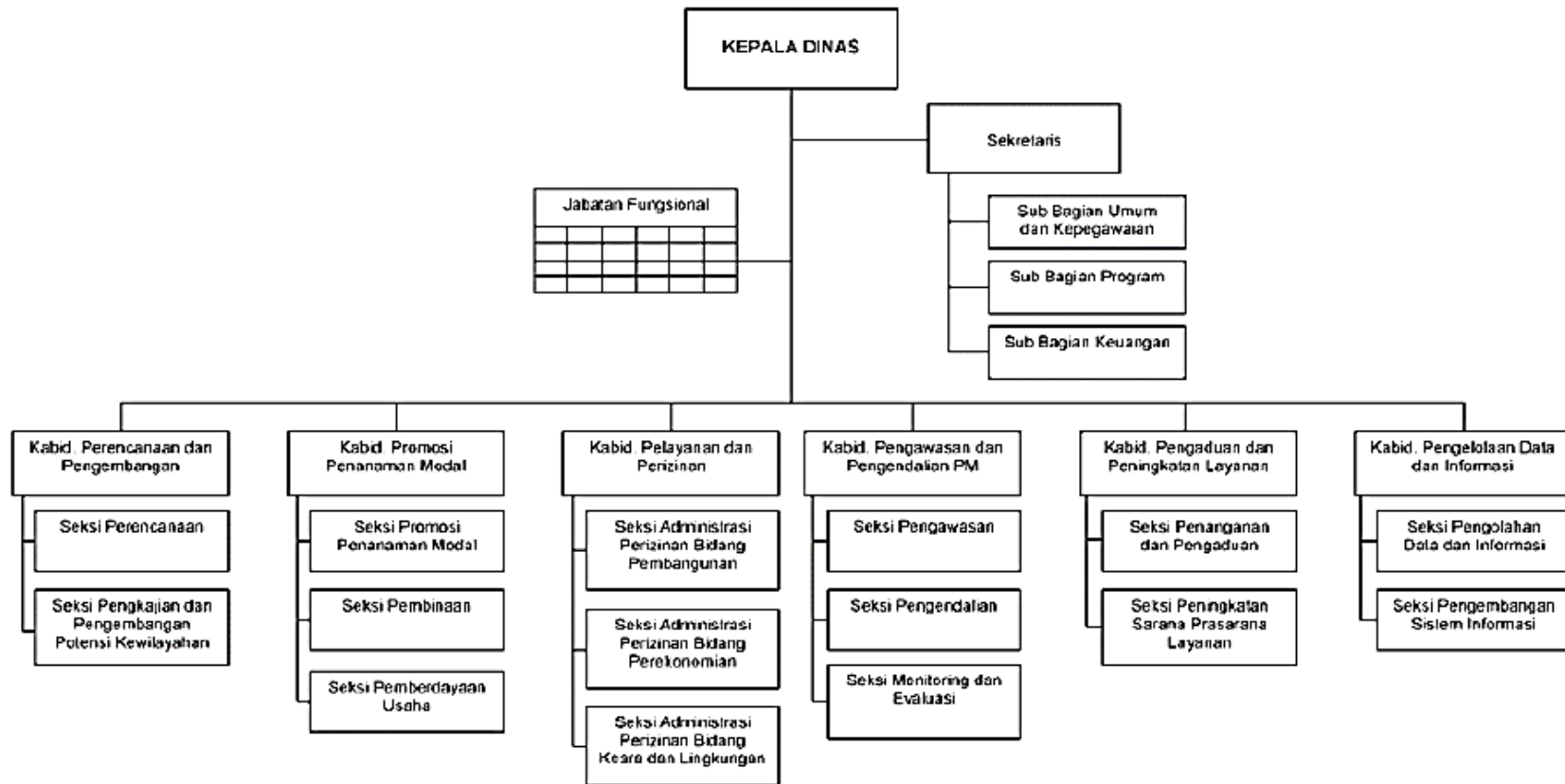
Secara keseluruhan UPT PTSP BPMD (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 158 izin dan non izin. Dalam peraturan tersebut jenis izin dan non izin yang dilimpahkan meliputi bidang:

1. Penanaman modal
2. Tenaga kerja
3. Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah
4. Kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat

5. Social
6. Pengelolaan sumber daya air
7. Kelautan dan perikanan
8. Kehutanan
9. Pekerjaan umum
10. Perhubungan, komunikasi dan informatika
11. Perindustrian dan perdagangan
12. Kesehatan
13. Peternakan dan kesehatan hewan
14. Perkebunan
15. Lingkungan hidup
16. Energi dan sumber daya mineral, dan
17. Pendidikan

2.3.4 Struktur Organisasi

Gambar 2.3
Struktur Organisasi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah



2.4 Keterkaitan dengan pengelolaan air tanah

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

No.	Sub Urusan	Daerah Provinsi
1	Geologi (Air Tanah)	<ul style="list-style-type: none">a. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi.b. Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin perusahaan air tanah dalam Daerah provinsi.c. Penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah provinsi.